

**PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MENUJU
PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Penataan Kelembagaan di Kelurahan Ngampilan
Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

WAHYU DEDEANTO PRATAMA

NIT. 21303764

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Agrarian reform is a strategic program initiated by the Indonesian government aimed at balancing the structure of land ownership, control, use, and utilization for the welfare of the people. One of its main pillars is access arrangement, which focuses on the economic empowerment of agrarian reform beneficiaries. This study examines the implementation of the institutional arrangement phase within the access arrangement activities of agrarian reform in Ngampilan Urban Village, Ngampilan Subdistrict, Yogyakarta City, with a specific focus on its contribution to achieving Goal 8 of the Sustainable Development Goals (SDGs): Decent Work and Economic Growth.

Using a qualitative method with a case study approach, this research analyzes the indicators of decent work and economic growth that have been met following the implementation of institutional arrangements. Data were collected through in-depth interviews with key informants from the Yogyakarta City Land Office, Ngampilan Urban Village Government, the Cooperatives and SMEs Office of the Special Region of Yogyakarta, the Tourism Office of Yogyakarta City, and MSME actors who received access through agrarian reform. Field observations and document studies were also conducted to support the data.

The findings reveal that the implementation of institutional arrangements for agrarian reform beneficiaries in Ngampilan Urban Village has contributed positively to the achievement of SDG Goal 8. Nine out of thirteen indicators of decent work and economic growth have been fulfilled, including adequate income and productive employment, reasonable working hours, elimination of undesirable jobs, job stability and security, safe working environments, social dialogue, access to raw materials (land), labor, and capital. However, four indicators have not been optimally met: employment opportunities, combining jobs, equal opportunities and treatment in employment, and comprehensive social protection.

This study concludes that institutional arrangements have successfully improved the economic quality of the community and strengthened worker protection in Ngampilan. However, further efforts from local governments and relevant stakeholders are needed to promote broader job creation, ensure the right to annual leave, and enhance the inclusiveness of economic growth so that the benefits of agrarian reform can be distributed more equitably and sustainably among all members of the community.

Keyword: Decent Work, Institutional Arrangement, Economic Growth, Agrarian Reform, Sustainable Development Goals (SDGs)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRACT.....	v
INTISARI.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS.....	8
A. Keaslian Penelitian	8
B. Kerangka Teoritis	11
1. Paradigma Manajemen Pertanahan	11
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	13
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	15
4. Reforma Agraria.....	17
5. Penataan Aset	18
6. Penataan Akses.....	18
7. Penanganan Akses Reforma Agraria	20
8. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria	21
9. Pengembangan Usaha dan Fasilitas Akses Pemasaran	25
10. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	27
C. Kerangka Pemikiran	34
D. Pertanyaan Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38

A. Format Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	39
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	41
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV PROFIL KELURAHAN NGAMPILAN KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA	43
A. Kondisi Geografis Kelurahan Ngampilan	43
B. Kondisi Demografi Kelurahan Ngampilan.....	43
C. Sekilas Penerima Penanganan Akses Reforma Agraria	45
D. Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan	49
E. Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan.....	53
1. Penguatan Kelembagaan	53
2. Fasilitasi Kerja Sama.....	62
3. Pendampingan Kewirausahaan/Kelembagaan	64
4. Penyusunan Surat Keputusan Penetapan Kelompok Masyarakat67	
BAB V INDIKATOR PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.....	68
A. Kesempatan kerja	68
B. Pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif	72
C. Jam kerja yang layak	77
D. Menggabungkan pekerjaan.....	81
E. Pekerjaan yang harus dihapuskan.....	85
F. Stabilitas dan jaminan pekerjaan	86
G. Kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan	89
H. Lingkungan kerja yang aman	93
I. Jaminan sosial.....	97
J. Dialog sosial	99
K. <i>Land</i> (bahan mentah)	102
L. <i>Labor</i> (tenaga kerja)	105
M. <i>Capital</i> (modal).....	109
BAB VI PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115

B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memiliki peran besar dalam membangun landasan hukum untuk manajemen sumber daya tanah di seluruh negara. Ketika hukum agraria nasional dan hukum agraria kolonial berbeda, kehadiran UUPA mengakhiri dualisme hak atas tanah sebelumnya. Dengan pengesahan undang-undang ini, Indonesia berusaha untuk menyatukan berbagai aspek kepemilikan dan pemanfaatan tanah dalam satu kerangka hukum yang jelas, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Istilah reforma agraria ditemukan dalam pasal penjelasan UUPA, yang menekankan betapa pentingnya bagi pemilik lahan untuk mengelola lahan pertanian secara aktif. Konsep ini menekankan bahwa pemilik tanah harus terlibat secara langsung dalam memanfaatkan lahan mereka untuk mencapai tingkat produktivitas terbaik. Oleh karena itu, pada awal reforma agraria, upaya ini terutama ditujukan kepada petani yang tidak memiliki tanah sama sekali atau yang memiliki lahan dengan luas kurang dari 0,5 hektar.

Era Reformasi menjadi langkah awal pembaruan agraria yang ditujukan untuk masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kepentingan masyarakat, Pemerintah mempersiapkan program yang dirancang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu reforma agraria sebagai agenda utama yang diamatkan melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pelaksanaan Reforma Agraria diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Reforma agraria difokuskan pada pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan pemerataan penguasaan tanah untuk kepentingan masyarakat melalui penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*).

Kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria untuk mempercepat pencapaian tujuan penyediaan tanah untuk reforma agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria dan pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, strategi pelaksanaan reforma agraria harus berkeadilan, berkelanjutan, partisipasi, transparan dan akuntabel serta mengikuti perkembangan dan kebutuhan pembangunan nasional.

Reforma agraria merupakan program strategis yang mempunyai peranan penting dalam upaya menyeimbangkan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik agraria dan memungkinkan perekonomian subjek reforma agraria mencapai perekonomian yang adil. Pelaksanaan reforma agraria dibagi menjadi dua yaitu penataan aset merupakan penataan kembali melalui kegiatan redistribusi tanah guna mengatur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah. Sedangkan penataan akses merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan dukungan untuk mengembangkan sumber daya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024. Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria sebagai salah satu cara untuk melaksanakan Reforma Agraria, di mana dilaksanakannya penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan menciptakan sarana dan prasarana pendukung yang baik di pedesaan (Riyadi dkk. 2020).

Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 menyebutkan bahwa kegiatan Penataan Akses disebut juga Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria yang dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas program pendukung untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah dan mendorong inovasi kewirausahaan para subjek reforma agraria dalam bentuk bantuan langsung dan/atau program serta kerjasama dengan berbagai pihak secara berkesinambungan, yang diikuti oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta badan usaha. Kementerian ATR/BPN mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai

penerima manfaat program legalisasi aset, untuk memanfaatkan aset yang dimilikinya melalui pemberdayaan masyarakat (Riyadi dkk. 2020).

Menurut Sumodiningrat dalam Habib (2021), secara teoritis pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan orang-orang dalam sebuah komunitas yang berkumpul untuk merencanakan dan bertindak bersama untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang memasukkan nilai-nilai sosial. Konsep ini menggambarkan paradigma baru pembangunan yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan (Zafar dalam Rohman, 2019).

Reforma agraria bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini sesuai dengan RPJMN IV 2020–2024, Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2020–2024 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN mengadopsi teori paradigma manajemen pertanahan yang di populerkan oleh Enemark. Jika fungsi-fungsi administrasi pertanahan terpenuhi akan mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan (Sutaryono, 2023). Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat membuat program Penanganan Akses Reforma Agraria untuk memberikan kontribusi demi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SDGs merupakan agenda yang diikuti 159 Kepala Negara dengan tujuan pembangunan yang mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang mendorong keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terselenggaranya tata kelola yang mampu menopang perbaikan kualitas hidup dari generasi ke generasi menurut Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi (2020). SDGs memiliki 17 tujuan

dan 169 target, dalam penelitian ini berfokus pada salah satunya adalah tujuan ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria di pusat hingga daerah menurut Dirjen Penataan Agraria ATR/BPN dalam (Sopyan dan Sidipurwenty, 2024). Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023, Penataan Akses Reforma Agraria dilaksanakan melalui 3 fase, yang terdiri dari: a. Kegiatan fase pertama Penanganan Akses Reforma Agraria; b. Kegiatan fase kedua Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria; c. Kegiatan fase ketiga Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran.

Penataan akses reforma agraria bukan hanya persoalan kepemilikan lahan saja, namun juga erat kaitannya dengan peningkatan kualitas kerja dan kesejahteraan masyarakat. Di beberapa daerah, program reforma agraria telah memungkinkan petani kecil memperoleh akses ke lahan yang lebih luas, yang kemudian dapat mereka kelola secara produktif. Sebuah penelitian oleh Setiawan dan Sari (2021) menunjukkan bahwa petani yang mendapatkan akses terhadap lahan melalui reforma agraria menerima peningkatan pendapatan hingga 30%, yang tidak hanya meningkatkan standar hidup mereka tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun penelitian yang dilaksanakan oleh Rohman (2019) mendapati bahwa penataan akses di Desa Tahunan tidak berjalan dengan baik dilihat dari ketidaksesuaian antara teori dan temuan di lapangan. Oleh karena itu penulis tertarik melaksanakan penelitian tentang penataan akses yang berfokus pada fase kedua yaitu penataan kelembagaan penerima akses reforma agraria. Menurut Sutaryono dkk., (2019) keberhasilan reforma agraria bergantung pada penataan kelembagaan karena diperlukan sinergi antara *stakeholder* yang sulit untuk dicapai dan merupakan tahapan yang harus dilaksanakan dalam program tersebut.

Dalam melaksanakan reforma agraria di Kota Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menjadikan Kelurahan Ngampilan sebagai lokasi Penataan Akses Reforma Agraria. Kelurahan ini terletak di tengah Kota Yogyakarta yang juga terkenal sebagai sentral pembuatan bakpia menjadi daya

tarik bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Melalui industri kuliner Bakpia yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dimiliki masyarakat setempat diharapkan dapat memberikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi warga setempat (Prasetya & Utami, 2023).

Hasil *assessment* data yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta terdapat 3 jenis UMKM yang menjadi subjek Penataan Akses Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan, yaitu *ecoprint*, rajut dan bakpia. Berdasarkan laporan akhir Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tahun 2024, kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan telah menyelesaikan fase kedua yaitu Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria.

Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria menjadi fokus penting untuk diteliti guna mengidentifikasi apa saja indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi pada fase Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan dalam menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat desa. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah **“Penataan Akses Reforma Agraria Menuju Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Penataan Kelembagaan di Kelurahan Ngampilan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Penataan Akses Reforma Agraria didesain untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam penelitian ini akan befokus pada Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang menurut Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi (2020) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta peningkatan lapangan kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menentukan rumusan masalah, yaitu apa saja indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi pada fase Penataan Kelembagaan Penerima Akses

Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi pada pelaksanaan fase Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang agraria, khususnya dalam pentingnya Penataan Kelembagaan dalam memenuhi indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang Reforma Agraria dan mempunyai kesempatan untuk mengetahui lebih jauh kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam melaksanakan Penataan Kelembagaan pada kegiatan Reforma Agraria.
2. Bagi instansi terkait seperti Pemerintah Kota Yogyakarta, Kemantren Ngampilan, Kelurahan Ngampilan dan para pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat memperkaya data dan informasi kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lahan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan rencana usaha dan pembangunan serta menjelaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan ilmu pengetahuan dalam Reforma Agraria menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Bagi masyarakat, peneliti mempunyai harapan yang tinggi agar hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan, pemikiran dan tindakan nyata untuk mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

E. Batasan Penelitian

Ada beberapa tahap dalam reforma agraria, yaitu penanganan akses reforma agraria, penataan kelembagaan penerima akses reforma agraria, pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran. Penelitian ini akan secara khusus meneliti tahap penataan kelembagaan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan Ke-8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penataan Kelembagaan penerima akses reforma agraria sudah berjalan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dinilai dengan terpenuhinya sepuluh (10) indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
2. Indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi di fase penataan kelembagaan adalah sebagai berikut.
 - 1) Pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif
 - 2) Jam kerja yang layak
 - 3) Pekerjaan yang harus dihapuskan
 - 4) Stabilitas dan jaminan pekerjaan
 - 5) Lingkungan yang aman
 - 6) Dialog sosial
 - 7) *Land* (bahan mentah)
 - 8) *Labor* (tenaga kerja)
 - 9) *Capital* (modal)

Sedangkan indikator yang tidak terpenuhi dalam kegiatan penataan kelembagaan penerima akses reforma agraria yaitu:

- 1) Kesempatan kerja
- 2) Menggabungkan pekerjaan
- 3) Kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan
- 4) Jaminan sosial

Secara keseluruhan, penataan kelembagaan di Kelurahan Ngampilan telah berhasil meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, memperkuat perlindungan dan hak-hak pekerja, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih layak dan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, masih diperlukan upaya lanjutan untuk memperluas penciptaan lapangan kerja,

memastikan hak cuti tahunan dan meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi agar manfaat reforma agraria dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat Ngampilan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan harus lebih mendorong pengembangan sektor usaha di Kelurahan Ngampilan. Peningkatan kapasitas UMKM dapat memberikan lebih banyak pengembangan jaringan pemasaran, memberikan akses ke sehingga tingkat produksi semakin meningkat yang mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja, kesempatan cuti, perlakuan yang adil dan jaminan sosial.
2. Dengan terlaksananya secara menyeluruh fase-fase penataan akses reforma agraria di Kelurahan Ngampilan dapat semakin efektif dalam mewujudkan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahbar, FK, 2021, Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat, *Tesis Pada Fakultas Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar
- Adewi, M., & Azhari. (2022). Pengaruh Investasi Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2020. *Jurnal Ekonomi Manajaemen Dan Sosial*, 9(1), 356–363.
- Adisurya, S. I., Ariani, Wilastrina, A., Riyanti, M. T., & Damayanti, R. A. (2023). Penerapan Ecoprint Dengan Metode Pounding Pada Produk Bernilai Jual Bagi Remaja Karang Taruna. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonforma*, 09(May), 1057–1066.
- Afriliyeni, Martua Sihaholo, & Rai Sita. (2021). Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(3), 433–449. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.834>
- Agustin, R., Aditya, I., & Ramdani, R. (2025). Upaya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang Dalam Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Karawang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 42–50.
- Andriani, D. N. (2017). Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Dan Bahan Baku Terhadap Hasil Produksi (Studi Kasus Pabrik Sepatu Pt. Kharisma Baru Indonesia). *EQUILIBRIUM*, 5(2), 151–162.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (n.d.). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*. 1(6), 1286–1295.
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494–512. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.494-512>
- Arief, H., & Pradini, U. R. (2019). *Analisis Peranan Stakeholder Dalam Penataan Kelembagaan Perikanan Dan Strategis Pengembangan Perikanan Kota Dumai Provinsi Riau*. 9(1), 1–17.
- Arisaputra, M. I. (2016). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*. 3, 1–36.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia 2023* (Issue 7).
- Bhastary, M. D., & Suward, K. (2018). Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 7(1), 47–60.
- Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN. (2023).

- Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023.*
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. In *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 6, Issue 1, pp. 135–143). <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Enemark, S. (2005). Understanding the Land Management Paradigm. *FIG Commission 7 Symposium On Innovative Technologies for Land Administration, July 2005*, 1–13.
- Fathony, A. A., & Meilani, M. (2024). *Standar Operasional Prosedur (Sop) Penyusunan Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Kantor Kecamatan Baleendah*. 15, 78–85.
- Febriana, A., Siddiq, N. K., Efendi, S., & Amalya, V. R. (2022). Reformasi Hukum Tanah Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global. *Jurnal Fundamental Justice*, 35–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1818>
- Fernandya, S. S., Yuwono, T., & Al-firdaus, L. K. (2022). Pengentasan Masalah Sosial Melalui People Centered Development Guna Memaksimalkan Pembangunan Di Indonesia. *Reformasi*, 12(1), 118–129.
- Fitria, S., & Aniqurrohman, L. (2023). Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia Jurnal Dunia Ilmu Hukum. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 1, 50–56.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110.
- Habibi, M., & Nugroho, R. (2019). Pelatihan Desain Grafis Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Upt Pelatihan Kerja Surabaya. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 3, 17–26.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *Jupiter*, XIII(2), 50–62.
- Indris, K., Syaparuddin, & Hodijah, S. (2014). Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(01), 41–62.
- International Labour Office. (2012). *Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia*.
- International Labour Organization. (2021). *Kerja Layak dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*.
- Istikharoh, I., Juliprijanto, W., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 - 2018. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 2(1), 109–125. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1399>
- Jalaliah, Wulandari, H. K., & Dumadi. (2022). Pengaruh Modal Kerja , Tenaga Kerja , dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan UMKM Pabrik Tahu (Studi Empiris UMKM Tahu Kecamatan Banjarharjo Periode Tahun 2019-2021). *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 68–78.

- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5, 284–302.
- Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. (2024). *Laporan Akhir Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). In *Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95870-5_300217
- Lalaun, A., & Siahaya, A. (2015). Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraanmasyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupatenmaluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 73–86.
- Lutfi, Khoswara, M., H, H. S. A., & Suseno. (2023). *Pencarian Rute Optimal Distribusi Melalui Pendekatan Metode Ant Colony Optimization (ACO) (Studi Kasus : Bakpia Pathok 25)*. 2(2), 63–71.
- Mahalli, K. (2008). Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, 3(3), 127–135.
- Mokalu, E. E., Rooney, G., & Stefanus, S. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. 1, 1–8.
- Mudjiarto. (2019). Model Pembinaan Umkm Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (Kasus Mitra Binaan Umkm Wilayah Jakarta, Bogor). *Ikraith Ekonomika*, 2(40), 105–112.
- Mukti, T. C. (2017). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 14–26.
- Nayaka, K. W., & Kartika, I. N. (2018). Pengaruh Modal, Tenaga Kerja Dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan Pengusaha Industri Sanggah Di Kecamatan Mengwi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8, 1927–1956.
- Nayasilana, I. N., Susintowati, Agustina, A., & Masyithoh, G. (2022). *Ecoprint sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat Yogyakarta*. 274–279.
- Neksen, A., Wadud, M., & Handayani, S. (2021). Pengaruh Beban Kerja dan Jam Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Grup Global Sumatera. *Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran & SDM*, 2(2), 105–112. <https://doi.org/10.47747/jnmpsdm.v2i2.282>
- Nihayati, L. (2020). Dampak sosial perkembangan bakpia dalam industri pariwisata di pathuk yogyakarta. *Pringgitan*, 01(01), 40–47.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Granasurya.
- Octaviano, R. A., & Hartanto, D. D. (2022). *Program Community Engagement Pengembangan Produk Ecoprint sebagai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) “ Nostra Gallery ” di Yogyakarta*. 22(2), 69–77. <https://doi.org/10.9744/nirmana.22.2.69-77>

- Pakpahan, C. G., Farabi, M. F. F., & Rachmania, R. R. (2023). Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(4), 1285–1308. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560>
- Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria (2024).
- Ponto, V. M. (2023). Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals). *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies*, 7(1), 85–96.
- Prasetya, B. P., & Utami, K. S. (2023). Faktor yang mempengaruhi financial behavior produsen bakpia di Yogyakarta. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(2), 414–425. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i2.1226>
- Priatna, H., & Trisnawan, M. R. (2016). Pengaruh Persediaan Bahan Baku Dan Volume Penjualan Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus Pada Cv. Cisatex Di Daerah Majalaya). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7, 1–7.
- Puspitasari, N. E. A. (2014). *Jurnal Penataan Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun*. 6, 1–18.
- Ragiliawan, Z., & Gunawan, B. T. (2021). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(1), 48–60.
- Rahadian, A. H. (2016). *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. III(01).
- Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 3(2), 20–39. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105>
- Rohman, M. L. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Rosdiana, A. (n.d.). Rajutan pada kriya seni. *SULUH*, 69–80.
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 76–88. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>
- Saleh, B., & Warlina, L. (2013). Identifikasi Karakteristik Aglomerasi Industri Pengolahan Di Cikarang Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Dan 2013. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 03, 37–53.
- Salsabilla, A., Juliannisa, I. A., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(2), 96–105.
- Setiawan, A. (2021). *Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi*. 10(2), 117–142. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). *Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 13(3), 327–340.
- Soleh, A. (2011). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia*. 197–209.

- Sopyan, A. A. P., & Sidipurwenty, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesenjangan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) : Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Jurnal Publicuho*, 5(4), 995–1010.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (1st ed.).
- Surasdiman, Gunawan, & Kadir, I. (2019). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Batu-Batu Kabupaten Soppeng*. 2(1).
- Suryana, A. T. (2022). Teori Produksi. In *Pengantar Ekonomi Mikro (Teori dan Praktis)* (pp. 49–66).
- Suryono, A. (2025). *Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Dalam Penataan Organisasi Dan Tata Laksana*. 5(1).
- Sutaryono. (2022). *Manajemen Pertanahan IKN*. 2–3.
- Sutaryono. (2023). Urgensi Manajemen Pertanahan Desa. In *Negara Berdesa Desa Bernegara* (pp. 102–124). <https://doi.org/10.5555/asdf>
- Sutaryono, Wahyuni, & Pinuji, S. (2019). *Penataan Kelembagaan Reforma Agraria Untuk Mempercepat Penerapan Reforma Agraria di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat*.
- Syahidin, & Ramadhan, M. (2022). *Prospek Pengembangan Usaha Alwa Kangen Water Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*. 4(1).
- Syahputra, R. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 1(2), 183–191.
- Triningsih, A. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan*.
- UNESCO. (2019). *UNESCO Priority Gender Equality Action Plan 2019*.
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202–213.
- Wadu, L. B., Gultom, A. F., Pantus, F., & Malang, U. K. (2020). *Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi : Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan*. 10(November), 80–88.
- Werdayanti, A. (2008). *Pengaruh Kompetensi Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Di Kelas Dan Fasilitas Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa*. 3(1), 79–92.
- Yogyakarta, B. P. S. K. (2024). *Kecamatan Ngampilan Dalam Angka 2024*.
- Yusda, D. D., Kumalasari, N., & Khoiriah, N. (2023). *Memaksimalkan Pengembangan Usaha Lewat Online*. 1(2), 52–62.
- Zuhri, A. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Sentra Bakpia Pathok Di Yogyakarta*.
- Zulfikar, F. E. (2018). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja anak dibawah umur pada sektor informal di kota makassar*.